

Advertorial

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

RAPBN
2025





Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Kondisi Perekonomian	3
Target Pembangunan	5
Fokus Kebijakan Fiskal 2024.....	6
Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6
Postur APBN.....	7

BELANJA NEGARA 10

Belanja Pemerintah Pusat	11
Anggaran Tematik	14
Transfer ke Daerah	26

PENDAPATAN NEGARA 27

Penerimaan Perpajakan.....	28
Penerimaan Pajak.....	29
Kepabeanan dan Cukai	30
Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	31

PEMBIAYAAN & DEFISIT ANGGARAN 32

Pembiayaan Anggaran.....	33
Pembiayaan Utang.....	34
Pembiayaan Investasi	35





Kondisi Perekonomian

RAPBN Tahun 2025 merupakan APBN transisi yang mempertimbangkan faktor perekonomian global serta bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Desain APBN untuk mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya.

Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja resilien. Kinerja neraca perdagangan masih mencatatkan surplus di tengah perekonomian dunia yang relatif stagnan

Laju inflasi tetap terjaga pada tingkat yang rendah, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat, dan India.



Perekonomian global yang masih dinamis diperkirakan akan menjadi tantangan terhadap kinerja ekonomi ke depan. penurunan inflasi global yang masih terbatas menyebabkan tertundanya normalisasi kebijakan moneter bank sentral negara-negara maju.

Fragmentasi dan proteksionisme akibat tensi geopolitik yang masih eskalatif, perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah yang belum mereda, serta risiko persaingan hegemoni AS-Tiongkok masih berlanjut.

Akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri termasuk hilirisasi, penguatan sektor jasa termasuk ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta penguatan reformasi struktural





Target Pembangunan 2025



Tingkat Pengangguran (%)
4,5 – 5,0



Indeks Modal Manusia
0,56



Tingkat Kemiskinan (%)
7,0 – 8,0



Gini Ratio
0,379 – 0,382



Nilai Tukar Petani
115-120



Nilai Tukar Nelayan
105-108





Fokus Kebijakan Fiskal 2025



Strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang difokuskan pada keberlanjutan dukungan terhadap pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi



Strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang yang diarahkan pada hilirisasi dan transformasi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan kualitas SDM, serta kesejahteraan yang berkeadilan (inklusi)

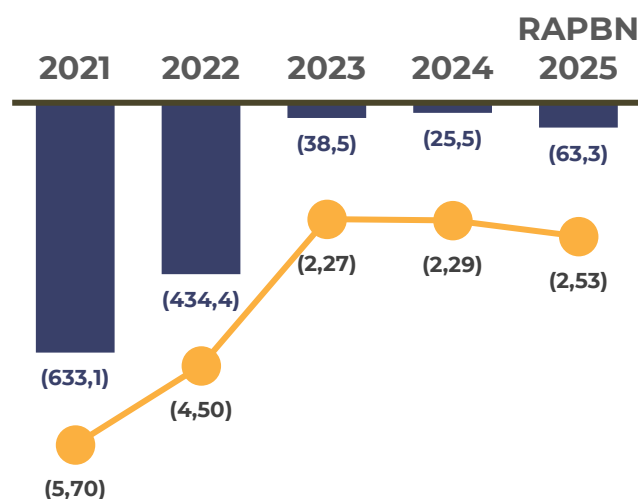


Untuk mendukung pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlu ditopang dengan penguatan fiskal yang holistik untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan melalui *collecting more, spending better*, serta *innovative financing* secara prudent



RAPBN 2025 Sehat, Akseleratif, dan Supportif

- Keseimbangan Primer (triliunRupiah)
- Defisit thd PDB (%)





Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2025



Pertumbuhan Ekonomi

Stabilitas ekonomi makro terus dipertahankan dengan menjaga situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Reformasi struktural akan memperkuat fondasi perekonomian ke depan



Inflasi

Laju inflasi tahun 2024 terkendali dalam rentang sasaran target inflasi dikendalikan oleh optimalisasi peran APBN sebagai *shock absorber* serta daya beli masyarakat yang kuat



Tingkat Bunga SBN 10 Tahun

Terjaganya fundamental perekonomian domestik serta kebijakan pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable* akan menopang kinerja pasar SBN domestik



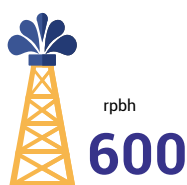
Nilai Tukar

Kondisi perekonomian domestik yang stabil akan meningkatkan kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia sehingga mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah



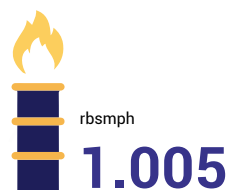
Harga Minyak Mentah

Pergerakan harga minyak di tahun 2024 dipengaruhi oleh penurunan stok minyak mentah global akibat kebijakan pemotongan produksi oleh OPEC+



Lifting Minyak

Pemerintah terus berupaya mempertahankan produksi hulu migas nasional, antara lain melalui pengembangan *giant fields* jangka menengah, mendorong kegiatan eksplorasi, serta perbaikan regulasi untuk menarik investor



Lifting Gas





Pendapatan Negara

Rp2.996,9 T

Mencapai 12,32% dari PDB terutama didukung langkah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan reformasi perpajakan

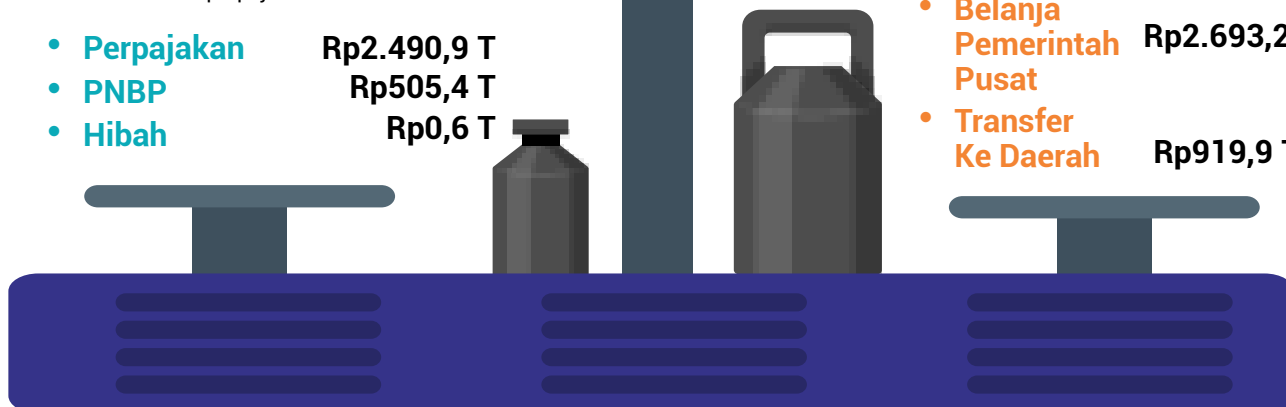
- **Perpajakan** Rp2.490,9 T
- **PNBP** Rp505,4 T
- **Hibah** Rp0,6 T

Belanja Negara

Rp3.613,1 T

Dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi dan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional

- **Belanja Pemerintah Pusat** Rp2.693,2 T
- **Transfer Ke Daerah** Rp919,9 T



Pembiayaan Anggaran

Rp616,2 T

antara lain :

- **Pembiayaan Utang** Rp775,9 T
- **Pembiayaan Investasi** Rp(154,5) T
- **Pemberian Pinjaman** Rp(5,4) T





Kinerja Pembangunan

mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan

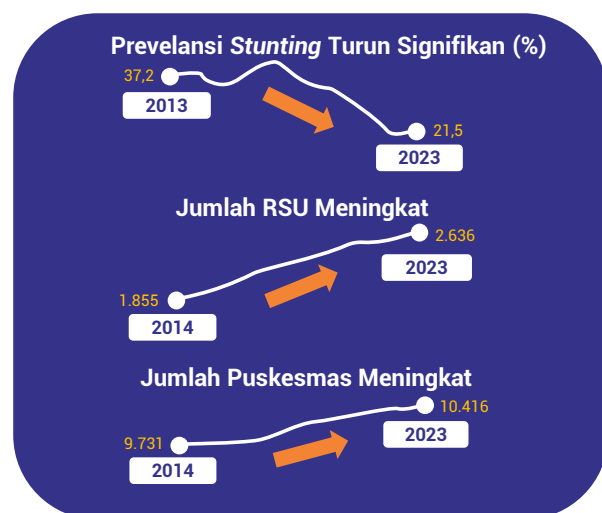
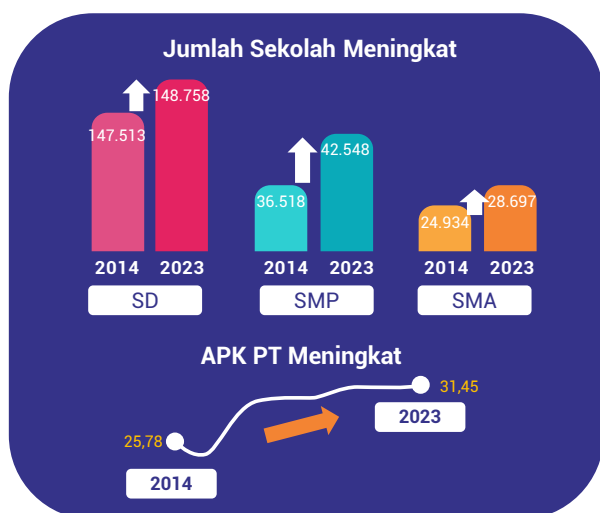


**PENDIDIKAN UNTUK
SDM UNGGUL**
Rp4.006,1 T
(2015-2023)



**KESEHATAN UNTUK
PRODUKTIVITAS**
Rp1.335,5 T
(2015-2023*)

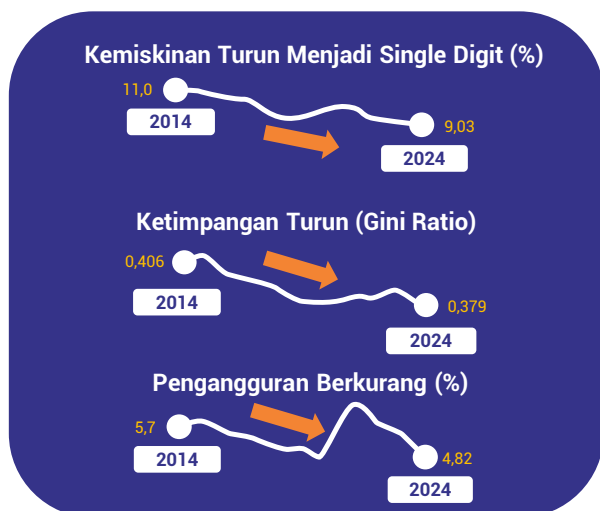
*Terkait Covid-19 Rp293,7T (2020-2022)



**PERLINSOS UNTUK
KESEJAHTERAAN**
Rp3.127,6 T
(2015-2023)



**INFRASTRUKTUR
UNTUK DAYA SAING**
Rp3.167,4 T
(2015-2023)

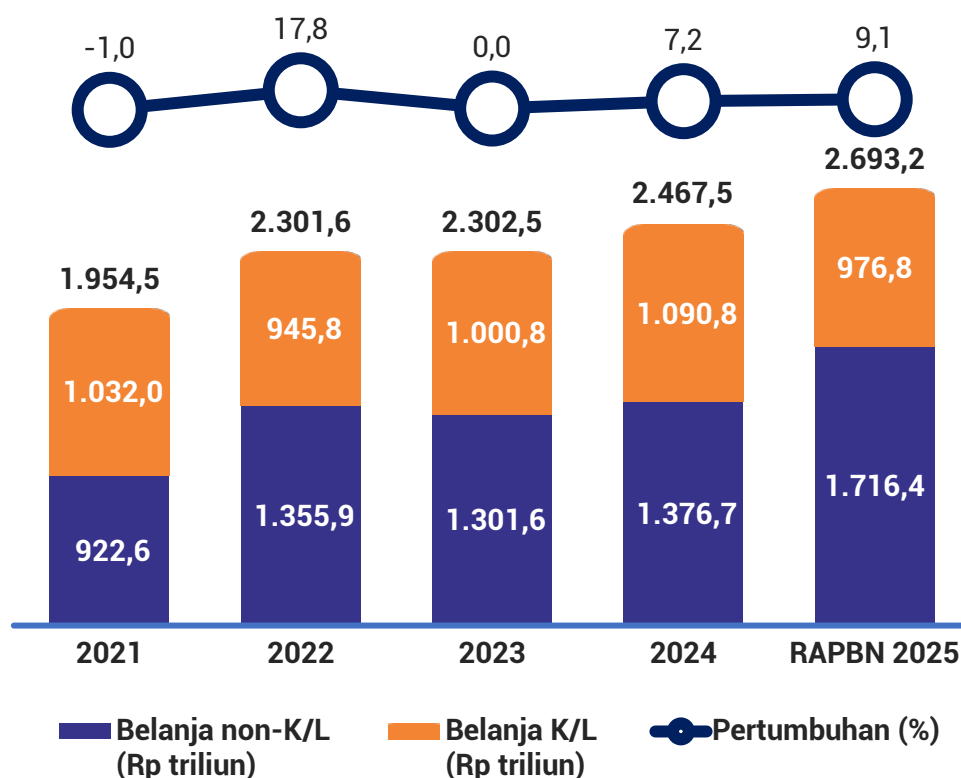


Belanja Negara



Belanja Pemerintah Pusat

Kualitas belanja ditingkatkan melalui efisiensi dan efektivitas untuk akselerasi transformasi ekonomi



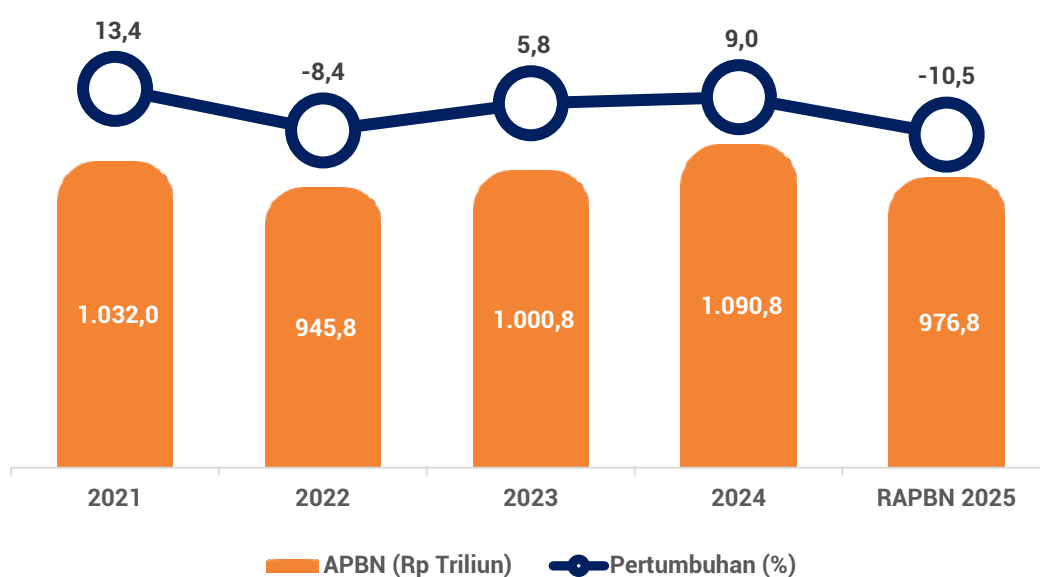
Kebijakan a.1

- ✓ Belanja difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
- ✓ Untuk belanja nonprioritas, khususnya belanja barang, terus diefisienkan
- ✓ Belanja modal diutamakan untuk mendukung transformasi ekonomi;
- ✓ Reformasi subsidi dan perlindungan sosial diperkuat agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan



Belanja Kementerian/Lembaga

Rp976,8 T



Kebijakan khusus a.l

Penguatan Bidang Agenda Pembangunan:
(1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perlinsos;
(4) Ketahanan pangan, (5) Infrastruktur,
(6) hilirisasi industri, (7) peningkatan investasi,
dan (8) pengarusutamaan gender.



Kebijakan Umum a.l

- Kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel
- Pemanfaatan Belanja K/L sesuai dengan Tema dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah serta Tema Kebijakan Fiskal TA 2025
- Menjaga kebutuhan belanja minimum pemerintahan
- Penguatan belanja modal sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi
- Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Belanja K/L dengan TKD
- Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri (TKDN)










Anggaran Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Tantangan Pendidikan Indonesia

-  Indikator *Human Capital Index* (HCI) yang lebih rendah dibandingkan rata-rata negara ASEAN
-  Skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang belum meningkat signifikan)
-  Kebutuhan sarpras serta tenaga pengajar berkualitas
-  Tingginya tingkat pengangguran lulusan vokasi
-  Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi (PT) yang belum optimal

Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan



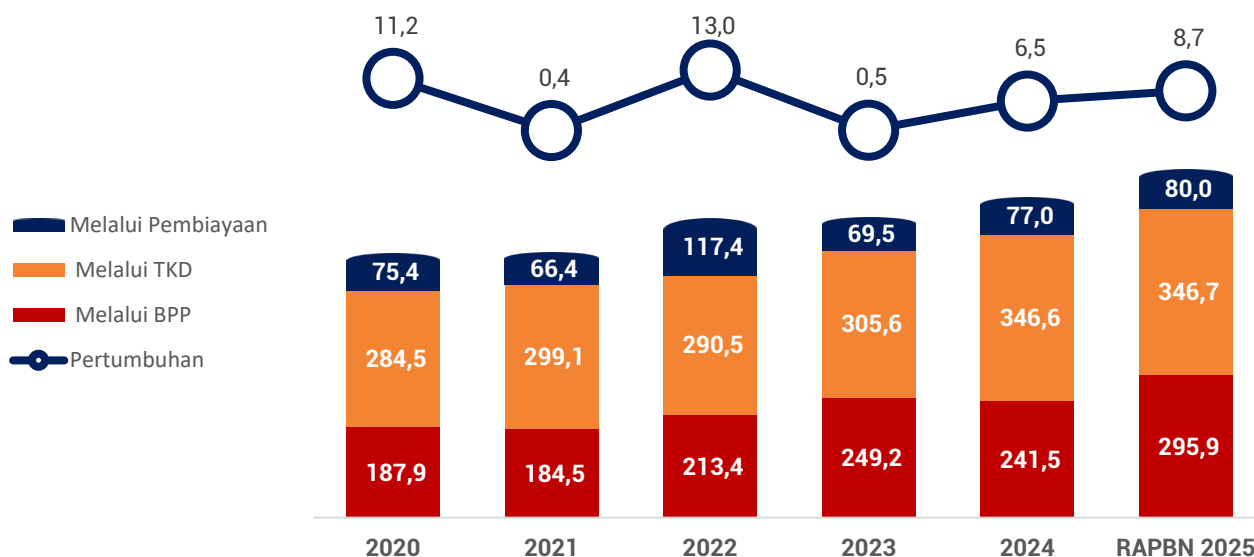
-  Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah) termasuk pada pendidikan keagamaan
-  Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program guru penggerak dan pemberian sertifikat pendidik
-  Penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD melalui optimalisasi APBD
-  Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan
-  Percepatan peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan
-  Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan dan penguatan perguruan tinggi
-  Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dan Perbaikan sekolah yang perlu renovasi
-  Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemberian makan bergizi



Anggaran Pendidikan

Rp 722,6 T

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Anggaran Pendidikan tahun 2025, terdiri dari:

Rp295,9 T

Melalui Belanja Pemerintah Pusat, a.l.



- PIP kepada 20,4 juta siswa
- KIP Kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa
- TPG Non PNS untuk 477,7 ribu guru non PNS



Rp346,7 T

Melalui Transfer ke Daerah, a.l.



- BOS untuk 43,7 juta siswa
- BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik
- DAK Fisik Pendidikan untuk revitalisasi sebanyak 10.392 sarana pendidikan
- TPG ASND untuk 1,5 juta guru/tenaga pendidik

Rp80,0 T

Melalui Pembiayaan, a.l.



- Pemberian beasiswa melalui LPDP kepada 49.971 orang (kumulatif)
- Beasiswa Gelar dan Non Gelar kerjasama dengan dan Kemenag dan
- Pendanaan Riset.



Anggaran Kesehatan

Mewujudkan SDM sehat dan produktif, serta mendukung transformasi sistem kesehatan



Tantangan Kesehatan Indonesia

- Belum optimalnya layanan dasar dan kegiatan promotif-preventif
- Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan belum optimal
- Jumlah nakes per populasi masih kurang dan belum merata
- Koordinasi lintas sektor masih belum optimal
- Antisipasi pemenuhan fasilitas kesehatan atas *tren ageing population*
- Risiko kesehatan lainnya, a.l. dampak perubahan iklim dan peningkatan penyakit tidak menular

Arah Kebijakan Kesehatan Indonesia

- + Percepatan penurunan **stunting**, a.l. melalui pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita
- + Upaya promotif-preventif a.l. melalui pemeriksaan kesehatan gratis
- + Peningkatan efektivitas program JKN
- + Peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan **sarpras layanan kesehatan** primer dan rujukan a.l. melalui pembangunan RS berkualitas di daerah
- + Peningkatan **sinergi antar lembaga** dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
- + Peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi **SDM kesehatan**
- + Penguatan **kemandirian industri farmasi** secara bertahap

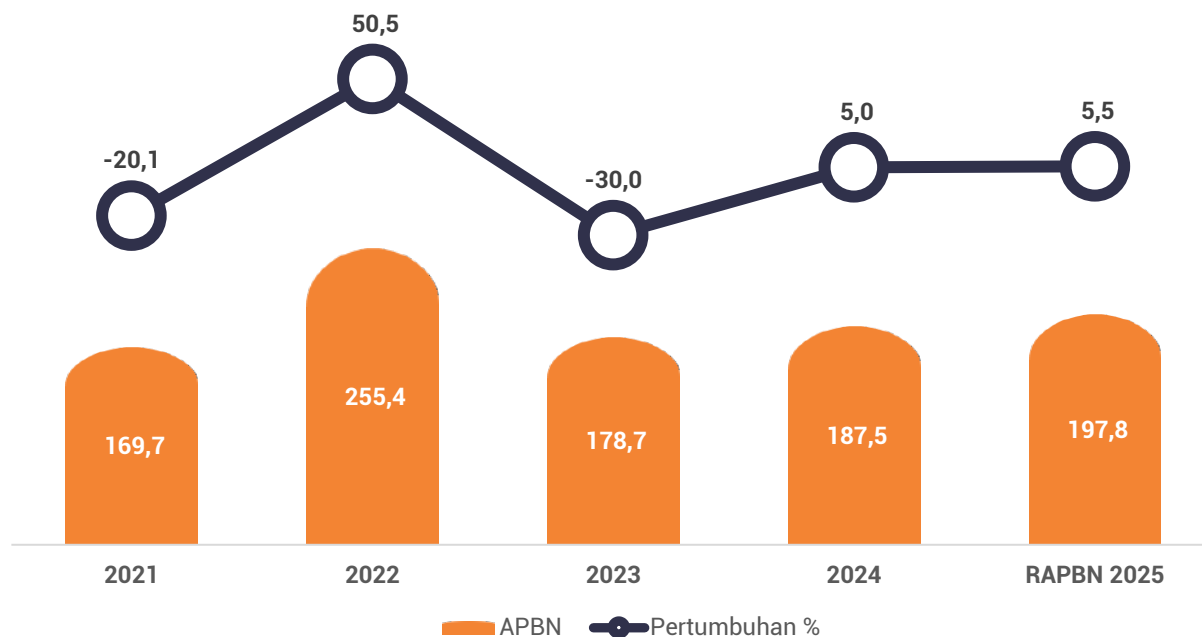




Anggaran Kesehatan

Rp 197,8 T

Mewujudkan SDM sehat dan produktif, serta mendukung transformasi sistem kesehatan



Target Output Prioritas



- Cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa
- Sampel makanan, obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 58.802 sampel
- Penyediaan makanan tambahan bagi 23.150 ibu hamil dan 140.374 balita (*buffer stock*)
- Penguatan 76 puskesmas dan penguatan SPA di 314 Rumah Sakit Daerah
- Bantuan pendidikan PPDS/PPDGS untuk 3.465 orang
- Pengadaan 22 unit laparoskopi dengan kamera dan monitor
- Penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 2.898 orang
- Penyediaan bantuan operasional kesehatan untuk 10.165 puskesmas
- Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebanyak 8,1 juta keluarga
- Rehabilitasi 727 balai penyuluhan KB dan Program Bangga Kencana di 6.323 balai penyuluhan KB





Anggaran Perlindungan Sosial



Tantangan Perlinsos

- Masih terdapat Ketidaktepatan sasaran penerima manfaat (*inclusion dan exclusion errors*) pada dalam penyaluran bansos dan subsidi
- Terbatasnya integrasi antar program perlinsos yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan program

Arah Kebijakan Perlinsos



Melanjutkan berbagai program perlinsos seperti PKH, Kartu Sembako, dan penyaluran subsidi dengan terus melanjutkan upaya perbaikan pensasaran program perlinsos untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*



Mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlinsos



Memperkuat perlinsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi *ageing population* termasuk penyandang disabilitas



Mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan



Meningkatkan efektivitas desain dan implementasi program perlinsos



Mendorong skema perlinsos adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis

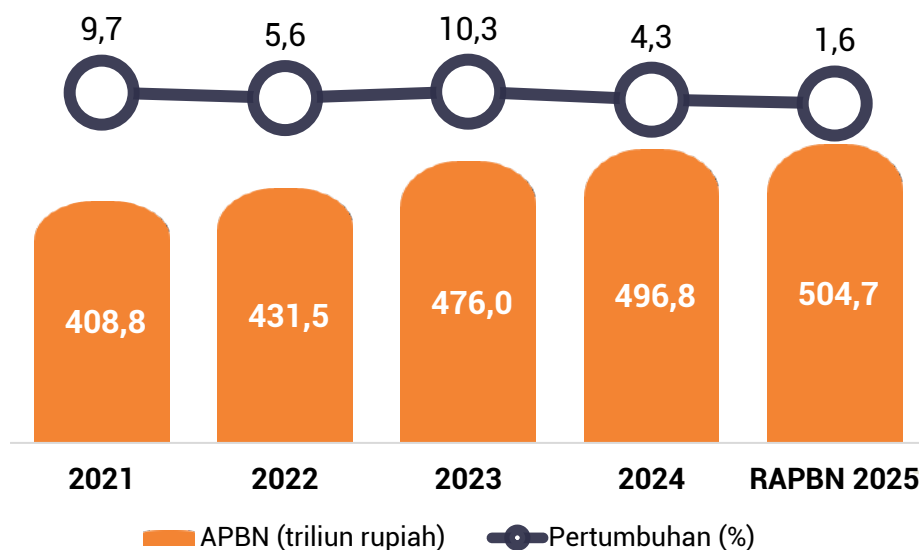




Anggaran Perlinsos

Rp 504,7 T

Pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan



Target Output Prioritas



Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10,0 juta KPM



Penyaluran Subsidi Jenis BBM Tertentu sebanyak 19,41 juta kiloliter



Program Bansos Sembako untuk 18,8 juta KPM



Penyaluran Subsidi LPG Tabung 3 kg sebanyak 8.170 juta kg



Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi 42,4 ribu anak, 37,4 ribu Lansia, serta 64,1 ribu penyandang disabilitas



Penyaluran Subsidi Bunga KUR untuk 7,05 juta debitur



Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana melalui BNPB



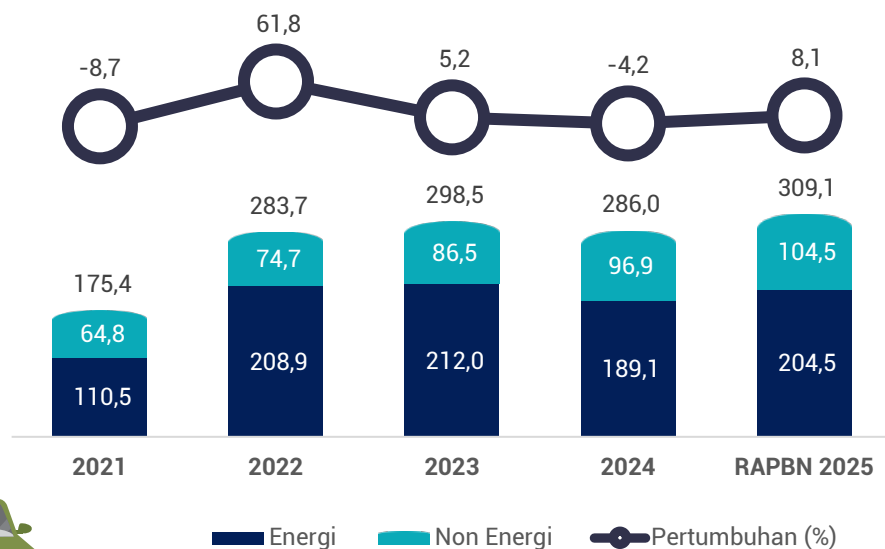
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 2,96 juta KPM di desa

keterangan: Program Perlisos termasuk penyaluran bansos melalui PIP, KIP Kuliah, dan Bantuan Iuran PBI JKN



Anggaran Subsidi

Diarahkan Untuk Stabilisasi Harga dan Menjaga Daya Beli, serta Mendukung UMKM



Kebijakan Subsidi



Subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG Tabung 3 Kg



Mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik dan penyediaan informasi publik



Subsidi listrik untuk Rumah Tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan



Pemberian Subsidi Bunga KUR kepada UMKM/ petani/ nelayan untuk meningkatkan daya saing usaha



Pemberian subsidi untuk jenis pupuk Urea, NPK, dan Organik pada komoditas prioritas dan pelaksanaan bantuan langsung pupuk kepada petani secara bertahap



Insentif perpajakan melalui subsidi pajak ditanggung pemerintah, sebagai stimulus kepada dunia usaha



Tantangan Pembangunan Infrastruktur

Pemenuhan layanan dasar

antara lain penyediaan akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, serta pemenuhan air minum, air bersih dan sanitasi yang bersih dan berkualitas, dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif.

Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

antara lain belum optimalnya pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik yang merata dan berkelanjutan, serta perlu pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan pemanfaatan energi ramah lingkungan (*green energy*).

Ketersediaan lahan

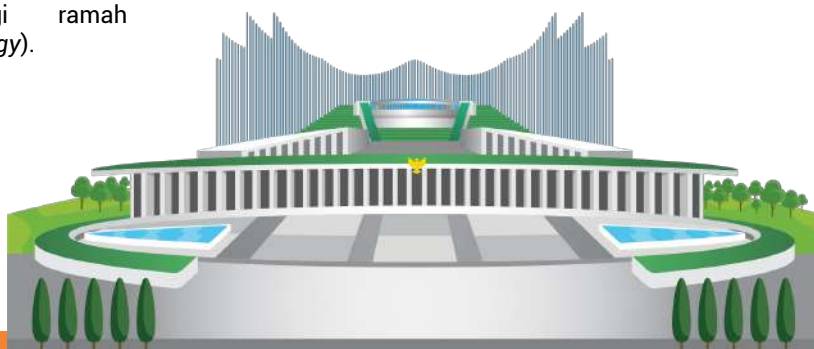
terutama kendala pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Program Prioritas lainnya

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

antara lain pemanfaatan teknologi digital yang belum merata terutama di daerah 3TP, serta perlu optimalisasi layanan digital yang mendukung ekonomi digital, stabilitas layanan publik dan pemerintahan (SPBE).

Infrastruktur konektivitas dan transportasi

antara lain percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan jalan tol dalam rangka pengembangan sistem jaringan jalan nasional, termasuk pengembangan jaringan transportasi (melalui peningkatan kapasitas bandara, fasilitas pelabuhan dan layanan angkutan laut, serta peningkatan prasarana perkeretaapian) yang terintegrasi dalam menghubungkan antar wilayah, yang mendukung kawasan strategis (KEK, Kawasan Industri, KSPN), dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk Kawasan IKN.



Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur

- ✓ Pembangunan jaringan irigasi dan bendungan
- ✓ Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dan renovasi sekolah.
- ✓ Pembangunan rumah sakit berkualitas
- ✓ Pembangunan Infrastruktur jaringan jalan, fasilitas pelabuhan dan bandara, serta konektivitas kereta api untuk menunjang hilirisasi
- ✓ Pembangunan jalan daerah yang mendorong pusat pertumbuhan
- ✓ Pemerataan infrastruktur digital dan teknologi
- ✓ Penyediaan/renovasi rumah bersantasi baik



Anggaran Infrastruktur

Rp 400,3 T

Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

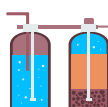
Layanan Dasar dan Pangan



Rumah Susun 3.884 unit,
dan Rumah Khusus 596
unit



Sarana dan Prasarana
Pendidikan Dasar,
Menengah, dan Tinggi
sebanyak 80 unit



SPAM dengan kapasitas 773
liter/detik



Jaringan irigasi
(Pembangunan seluas 2.000
Ha, dan Rehabilitasi seluas
15.000 Ha)

Konektivitas dan Transportasi



Jalan Nasional 159,1 km;
Jalan Tol 207,8 km



Jembatan baru 4.993,4 m;
Flyover/underpass
1.552,0 m

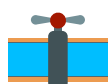


Bandar Udara 5 Lokasi



Pelabuhan penyeberangan
10 Lokasi dan Pelabuhan
Laut 39 lokasi

Energi dan Ketenagalistrikan



Jaringan Pipa Transmisi Gas
Bumi Ruas Cirebon –
Semarang



Pembangunan Bendungan
on going 18 unit
(akumulatif)



Bantuan Pasang Baru Listrik
kepada 130.000 rumah
tangga

Infrastruktur TIK



*Digital Broadcasting
System (DBS)* sebanyak 6
lokasi



Penyediaan Akses Internet di
36.830 lokasi layanan publik
(Akumulatif)



Operasional Satelit
multifungsi SATRIA-1
sebesar 150 Gbps



Anggaran Ketahanan Pangan



Tantangan

- **Produktivitas hasil pertanian masih rendah**, a.l. karena alih fungsi lahan, keterbatasan sarpras pertanian, serta keterbatasan kapasitas dan akses modal petani dan nelayan
- **Perubahan iklim dan keberadaan organisme pengganggu tanaman (OPT)** menyebabkan gagal panen
- **Biaya distribusi pangan yang tinggi** karena geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan
- **Hambatan rantai pasokan pangan dan stabilitas harga** akibat dinamika geopolitik
- **Kebutuhan konsumsi pangan terus meningkat** seiring peningkatan jumlah penduduk

Kebijakan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan



Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan



Perbaiki rantai distribusi hasil pertanian



Penyediaan sarana dan prasarana pertanian (pupuk, benih, alat, dan pestisida)



Penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan



Penguatan program perikanan budidaya



Penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan perlindungan usaha tani



Pembangunan infrastruktur pertanian a.l. bendungan dan irigasi

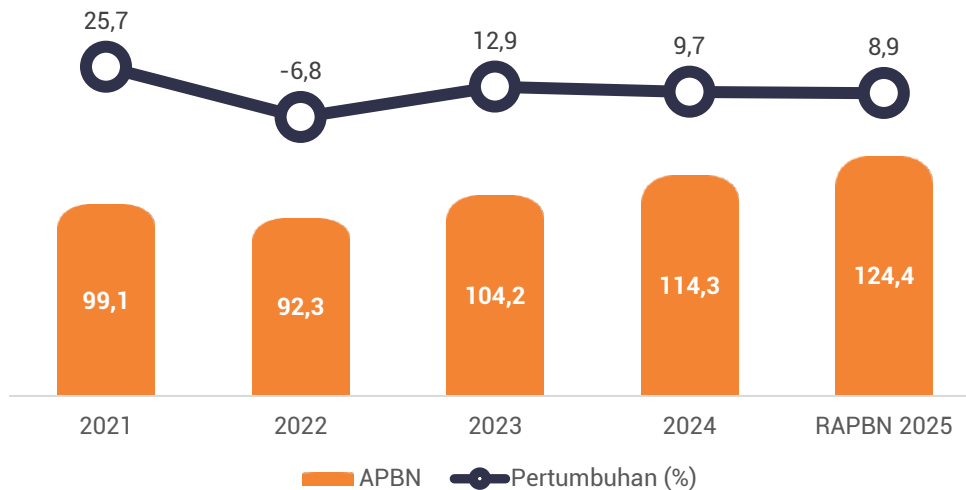




Anggaran Ketahanan Pangan

Rp 124,4 T

Kemandirian Pangan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian



Target Output Prioritas

- ✓ Kawasan padi seluas 435.000 ha
- ✓ Kawasan jagung seluas 250.000 ha
- ✓ Bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) prapanen sebanyak 7.908 unit
- ✓ Alsintan dan prasarana pasca panen sebanyak 1.294 unit
- ✓ Bantuan alat penangkapan ikan sebanyak 10.000 unit
- ✓ Bantuan benih dan calon induk ikan sebanyak 61,9 juta ekor
- ✓ Gerakan pangan murah di 39 lokasi
- ✓ Pengembangan Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)
- ✓ Pembangunan bendungan *on-going* (kumulatif) sebanyak 12 unit
- ✓ Pembangunan jaringan irigasi seluas 2.000 ha melalui pusat dan 1.500 ha melalui daerah
- ✓ Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 15.000 ha melalui pusat dan 205.000 ha melalui daerah
- ✓ Pengadaan/rehabilitasi sumber-sumber air 10.017 unit
- ✓ Pembangunan jalan pertanian 2.891 unit
- ✓ Pembangunan unit olah pakan ternak 169 paket
- ✓ Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana 63 pelabuhan perikanan
- ✓ Pembangunan/rehabilitasi 94 balai benih
- ✓ Dana ketahanan pangan dan pertanian untuk 1.000 paket/ kegiatan



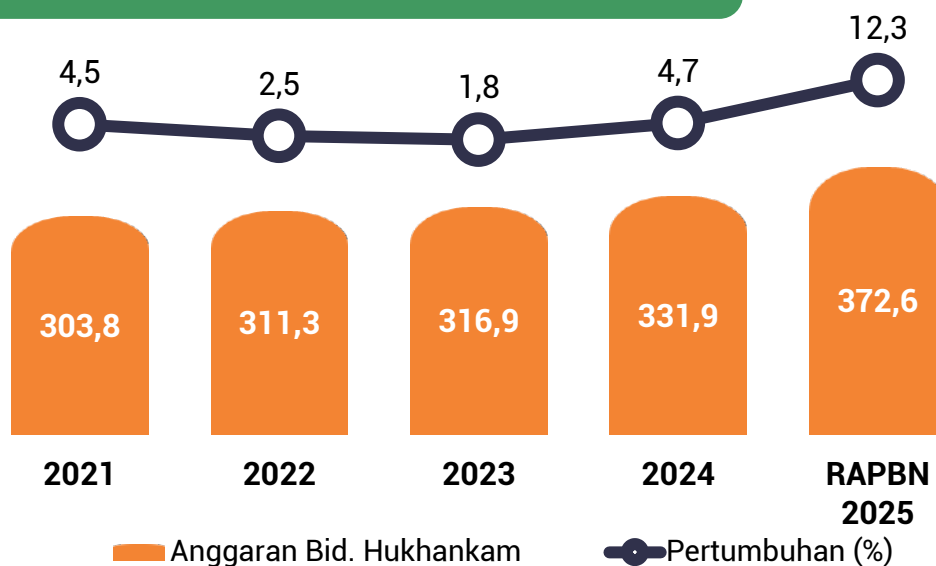


Anggaran Hukum & Hankam

Rp 372,6 T

Kebijakan

- Modernisasi alutsista TNI dan almatus Polri
- Transformasi pelayanan kepolisian
- Pencegahan dan penanggulangan narkoba
- Keamanan TIK dari ancaman siber
- Kemampuan industri strategis nasional
- Pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme



Output Strategis antara lain



Pengadaan/
Penggantian/
Harwat KRI, KAL,
Alpung dan
Ranpur/ Rantis
Matra Laut



Pengadaan/
Penggantian/
Harwat Pesawat
Udara Matra
Udara



Pengadaan/
Penggantian/
Harwat Ranpur/
Rantis Matra
Darat



Penyelesaian
Pidana Narkoba,
Pidana Umum
dan Terorisme



Pengadaan/
Dukungan Alutsista
TNI/ Almatus Polri/
Sarpras Pertahanan
dan Keamanan

Tantangan a.l



Meningkatnya
konflik geopolitik



Ketegangan
kawasan utara
Indonesia



Ancaman siber

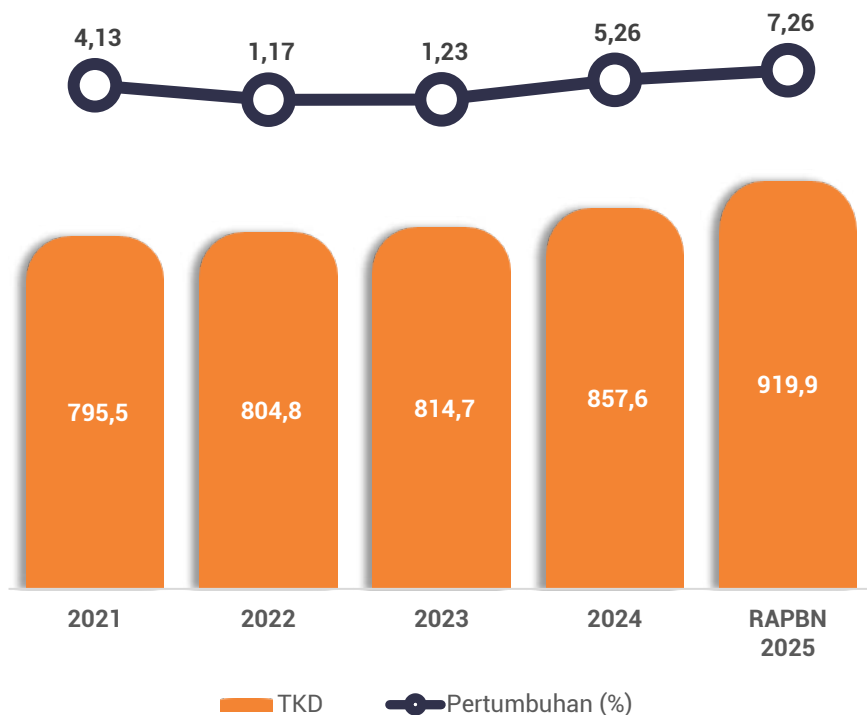


Ancaman
peredaran narkoba



Transfer Ke Daerah

diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah dengan nilai sebesar **Rp919,9 triliun**



Kebijakan TKD



Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan *local taxing power*, serta penguatan *well-being*



Meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antar-daerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*



Mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antardaerah



Memperbaiki mekanisme penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah



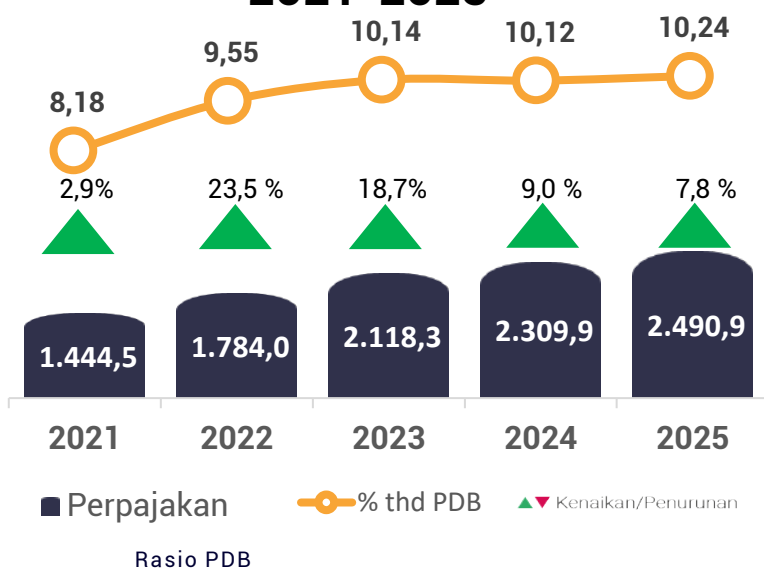
Pendapatan Negara



Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan 2025 diproyeksikan mencapai 10,24 persen PDB

Perpajakan dalam APBN, 2021-2025



10,24%

Kebijakan Perpajakan

- Intensifikasi dan ekstensifikasi.
- Pemanfaatan teknologi, *joint program*, serta penegakan hukum.
- Reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional.
- Insentif yang semakin terarah dan terukur.

Rasio PDB

9,00%

Penerimaan Pajak

Dipengaruhi efektivitas implementasi kebijakan UU HPP, proyeksi ekonomi domestik, dan risiko fluktuasi harga komoditas, dan *core tax administration system*



Rasio PDB

1,24%

Kepabeanian & Cukai

Konsisten menjalankan instrumen dalam mendukung perekonomian domestik, melindungi masyarakat, dan sumber penerimaan negara



Penerimaan Pajak

Rp2.189,3 T

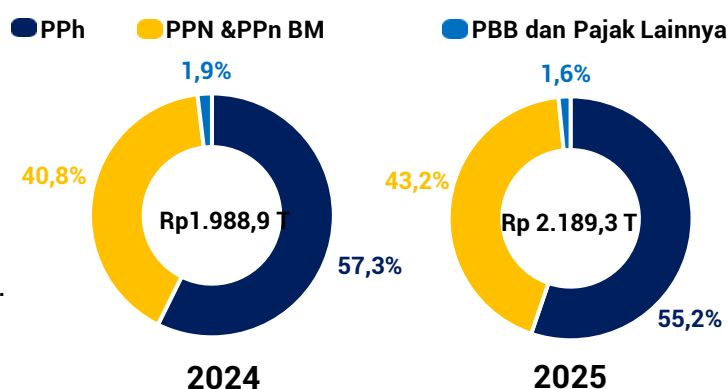
Dipengaruhi kinerja ekonomi domestik, efektivitas implementasi kebijakan (UU HPP), risiko fluktuasi harga komoditas, dan *core tax administration system*

Kebijakan Teknis,

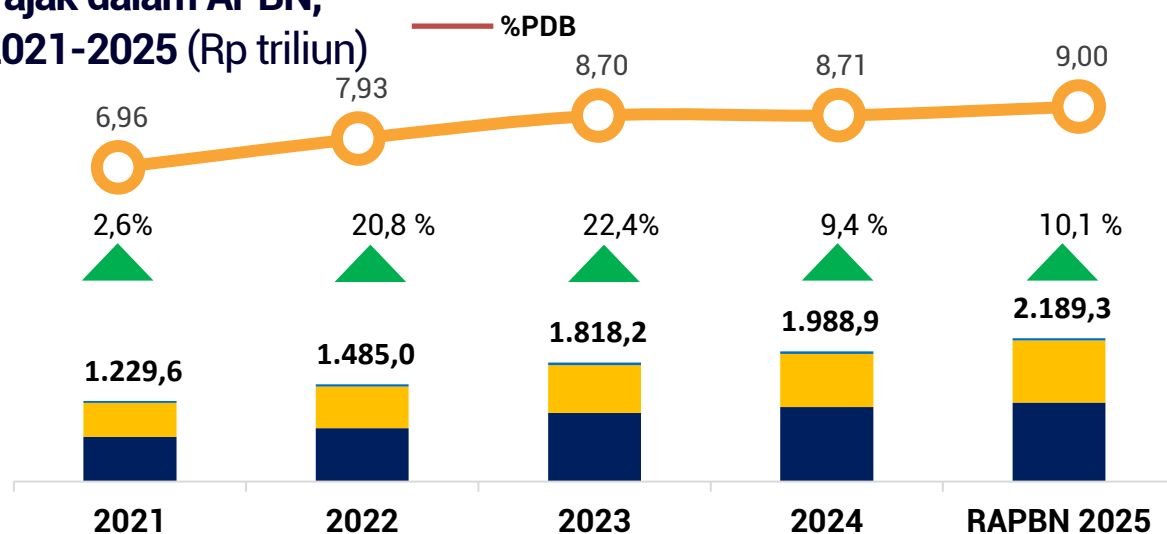
antara lain:

- ✓ Implementasi Core Tax
- ✓ Law enforcement;
- ✓ Prioritas pengawasan atas WP HWI
- ✓ Peningkatan kerja sama perpajakan internasional
- ✓ Pemanfaatan *digital forensic*
- ✓ Insentif fiskal yang terarah dan terukur.

Kontribusi Per Jenis Pajak



Pajak dalam APBN, 2021-2025 (Rp triliun)



Penerimaan PPh, dipengaruhi:

- ✓ Proyeksi pertumbuhan ekonomi
- ✓ Perbaikan utilisasi tenaga kerja

Penerimaan PPN & PPnBM, dipengaruhi:

- ✓ Efektivitas implementasi UU HPP
- ✓ Konsumsi domestik
- ✓ Perluasan basis pajak

PBB dan Pajak Lainnya, dipengaruhi:

- ✓ Objek pajak PBB-P3 dan fluktuasi harga komoditas
- ✓ Aktivitas transaksi bermeterai





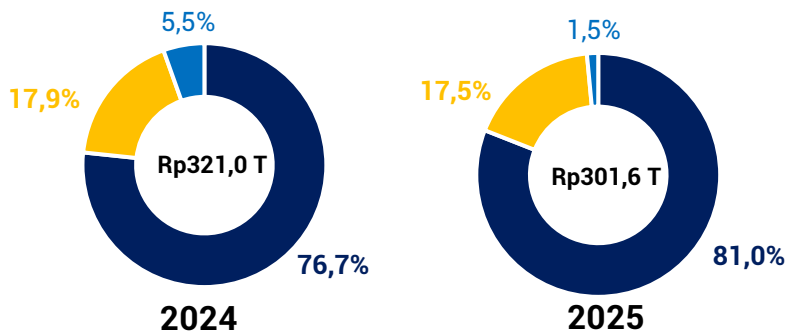
Kepabeanan & Cukai

Rp301,6 T

Dipengaruhi upaya pengawasan dan penindakan, implementasi MBDK, aktivitas perdagangan internasional, dan Harga Komoditas Terutama CPO

Kontribusi terhadap total Kepabeanan dan Cukai

- Cukai
- Bea Masuk
- Bea Keluar

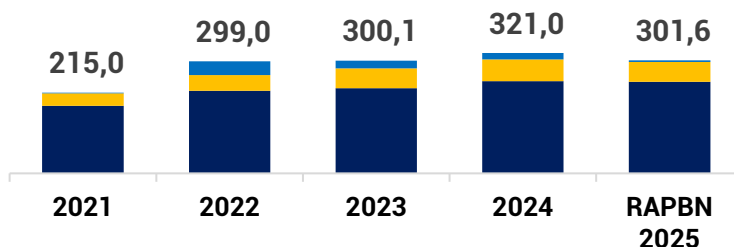


Kebijakan Teknis, antara lain Mendukung:

- ❑ **Perekonomian domestik:** Percepatan pembangunan IKN, mendukung Hilirisasi SDA, Pemberdayaan UMKM (klinik ekspor)
- ❑ **Pengawasan:** kebijakan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan barang kena cukai ilegal, dan pencegahan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan prekursor
- ❑ **Penerimaan Negara:** Upaya pengawasan dan penindakan, Ekstensifikasi BKC baru terbatas/MBDK, Penguatan Ceisa serta pembentukan *core revenue system*.

● Cukai ● Bea Masuk ● Bea Keluar

Kepabeanan dan Cukai dalam APBN, 2021-2025 (Rp triliun)



Penerimaan Cukai

Penerimaan cukai mencapai Rp244,2 T (81,0 persen dari total kepabeanan dan cukai) yang didorong upaya konsisten penindakan BKC ilegal dan implementasi MBDK

Pajak Perdagangan Internasional

Bea Masuk mencapai Rp52,9 T (17,5% total penerimaan BC), dipengaruhi proyeksi aktivitas impor terutama komoditas utama

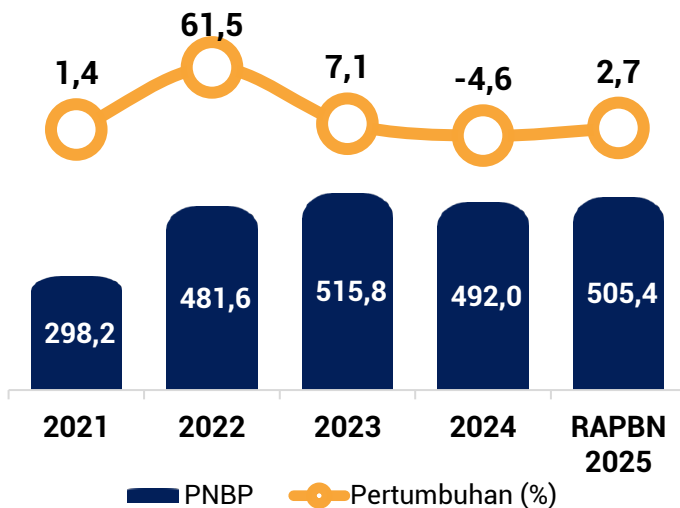
Bea Keluar mencapai Rp4,5 T (1,5% total penerimaan BC), dipengaruhi harga CPO dan kebijakan hilirisasi SDA





Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp 505,4 T



Proyeksi PNPB 2025, dipengaruhi oleh:

- ✓ Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US\$ dan harga minyak bumi (ICP)
- ✓ Optimalisasi *lifting* migas
- ✓ Moderasi harga batubara (HBA) dan CPO
- ✓ Implementasi *Automatic Blocking System* (ABS) dan SIMBARA sektor minerba
- ✓ Dukungan kinerja BUMN

Kebijakan Umum PNPB 2025

- ✓ Reformasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
- ✓ Optimalisasi dividen BUMN melalui perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN
- ✓ Peningkatan inovasi dan kualitas layanan serta optimalisasi pemanfaatan BMN
- ✓ Penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, a.l. SIMBARA dan *Automatic Blocking System* (ABS)



Rp121,0 T

Pendapatan Sumber Daya Alam

Dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US\$ dan harga minyak bumi, serta optimalisasi *lifting* migas.



Rp123,5 T

PNPB Lainnya

- ✓ Penjualan Hasil Tambang dan DMO dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas minyak bumi dan minerba.
- ✓ Optimalisasi PNPB K/L dilakukan melalui peningkatan inovasi dan kualitas layanan, pengelolaan aset BMN, serta peningkatan sinergi antarinstansi.



Rp86,0 T

Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan

Didukung oleh upaya penguatan tata kelola dan restrukturisasi BUMN untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMN.



Rp77,9 T

Pendapatan Badan Layanan Umum

- ✓ Pendapatan BLU sawit dipengaruhi tren moderasi harga komoditas sawit.
- ✓ Pendapatan BLU layanan didukung oleh peningkatan kemudahan akses layanan BLU dan sinergi antar-BLU.

Pembiayaan Anggaran



Pembiayaan Anggaran



Kebijakan Pembiayaan, a.l.

- ✓ Diarahkan untuk transformasi ekonomi a.l. infrastruktur TIK, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi
- ✓ Mendorong skema KPBU yang *sustainable* dan lebih masif
- ✓ Pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*)
- ✓ Penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF



Tantangan Pembiayaan Utang, a.l.

- ✓ Volatilitas dan pengetatan likuiditas pasar keuangan global
- ✓ Potensi *capital outflow* dari *emerging market*
- ✓ Potensi pelemahan nilai tukar
- ✓ Potensi kenaikan imbal hasil SBN

Tantangan Pembiayaan Investasi, a.l.

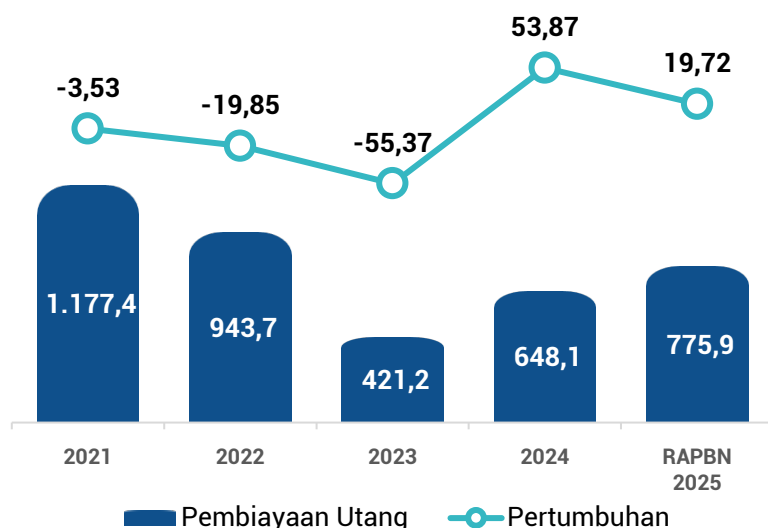
- ✓ BUMN dan BLU agar menjadi *value creator* dengan terus memberikan kontribusi positif bagi negara untuk mendukung perekonomian yang sejalan dengan berbagai program pembangunan
- ✓ Meningkatkan kinerja keuangan BUMN dan BLU penerima PMN agar lebih sehat dan profitable



Pembiayaan Utang

Rp 775,9 T

Pembiayaan APBN dengan biaya yang minimal dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi



Arah Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Utang

- ✓ Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dalam mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang.
- ✓ Mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri.
- ✓ Mengembangkan instrumen utang dalam rangka pendalaman pasar keuangan domestik dan memperluas alternatif sumber pembiayaan utang.
- ✓ Memperluas basis investor melalui penguatan literasi keuangan.
- ✓ Pengembangan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan.
- ✓ Memanfaatkan skema pengelolaan kewajiban utang (*liability management*) dan/atau instrumen lindung nilai.
- ✓ Mendukung pembangunan proyek infrastruktur dan pelaksanaan program strategis melalui pemberian penjaminan.
- ✓ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang melalui penyediaan informasi publik secara berkala dan komunikasi aktif.

Prinsip dan Strategi terkait Pengelolaan Utang

Akseleratif

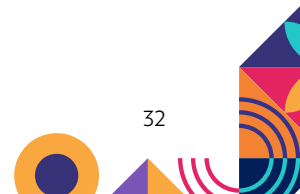
Memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan

Efisien

Memperhatikan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen utang

Seimbang

Menjaga portofolio utang yang optimal pada keseimbangan antara biaya dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal



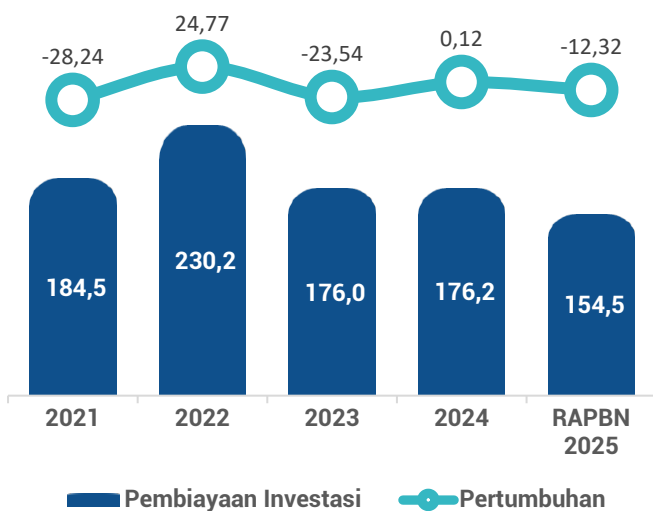


Pembiayaan Investasi

Rp 154,5 T

Kepada BUMN dan BLU, Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, Investasi Pemerintah oleh BUN dan Investasi Lainnya

Kebijakan



- ✓ Pembiayaan Investasi diberikan secara selektif, berdasarkan pertimbangan: sektor prioritas, penugasan pemerintah, manfaat ekonomi dan manfaat sosial
- ✓ Alokasi pembiayaan investasi tetap harus dibatasi pada tingkat yang optimum dengan memperhatikan rasio utang terhadap PDB dan menjaga kesehatan APBN serta kesinambungan fiskal.
- ✓ Pemerintah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembiayaan investasi melalui kebijakan pengalokasian yang selektif dan fokus bersinergi dengan agenda pembangunan pada RAPBN tahun anggaran 2025 terutama penguatan kualitas SDM melalui kebijakan di bidang pendidikan, penyelesaian pembangunan infrastruktur di tahun 2025, serta pembangunan ekonomi hijau.



BUMN & BLU

Rp 59,5 T

Investasi pada BUMN dan BLU diperuntukkan pada bidang infrastruktur, kesehatan, pertahanan, pendidikan, kerjasama internasional, dan bidang lainnya sesuai prioritas pemerintah.



Organisasi/ LKI/BUI

Rp1,8 T

Investasi kepada organisasi/ LKI/ BUI ditujukan dalam rangka:

1. menjaga kepentingan nasional Indonesia di forum internasional;
2. memenuhi kewajiban Indonesia sebagai Anggota organisasi/ LKI/BUI ; dan
3. mempertahankan dan meningkatkan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*).



Non Permanen

Rp18,8 T

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah kembali akan mengalokasikan investasi untuk program FLPP dalam rangka keberlanjutan program Pemberian fasilitas pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai bagian pemenuhan kebutuhan papan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.



Investasi Lainnya

Rp74,4 T

Investasi lainnya terdiri dari pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan dan cadangan pembiayaan investasi.



Advertorial

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

RAPBN
2025

Disusun oleh
Tim Kementerian Keuangan

Editor:

Dit. Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Direktorat Jenderal Anggaran

Ide dan Konsep

Bayu Segara
Reza Ibnu Prakoso

Data yang digunakan dalam buku ini

2021-2023: APBN (Perpres Rincian terbaru)
2024 : APBN
2025 : RAPBN





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
www.anggaran.kemenkeu.go.id